

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Ekonomi Politik

Ekonomi politik merupakan suatu ilmu yang mengkaji bagaimana persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi di suatu negara diselesaikan dengan menempatkan kekuatan politik sebagai kekuatan pendukung dalam memberikan solusi terhadap kasus-kasus ekonomi. Realita ini terlihat dari kejadian-kejadian di masa lalu, politik memiliki dimensi yang masuk ke berbagai lini dengan kata lain politik telah mewarnai berbagai instrumen kebijakan yang dilakukan.⁸ Ekonomi Politik adalah integrasi antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik, satu hal yang jarang diungkapkan bahwa ide ekonomi politik itu sendiri sebenarnya didasarkan pada pemisahan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Jika keduanya disatukan secara konseptual, maka ekonomi politik tidak dapat lagi dipandang sebagai hubungan antara dua jenis telaah yang berbeda.

Ekonomi dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan hal tersebut dapat dikaji dari dua sisi yang berbeda yaitu sisi ekonomi dan sisi politik. Berbagai kebijakan ekonomi menjadi tidak memiliki “*power*” untuk dilaksanakan tanpa ada dukungan politik, dengan kata lain politik berperan untuk menempatkan dan mendorong kebijakan ekonomi sebagai kebijakan yang harus dilaksanakan dan terrealisasi dengan baik.⁹ Ekonomi politik adalah fenomena ekonomi secara

⁸ Irham Fahmi. *Ekonomi Politik Teori dan Realita*. (Bandung:Alfabet, 2013). hal. 8-9

⁹ Rifky Rizal Fauzian. *Analisis Ekonomi Politik Masyarakat Desa Cintaratu Pasca Munculnya Wisata Baru Jojogan Wonderhills di Kabupaten Pangandaran*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya 2018. hal 16-17

umum, yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik, yakni menyoroti interaksi antara faktor ekonomi dan faktor politik. Istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. Dan para pakar menganggap pendekatan ekonomi politik lebih baik, terutama dalam menganalisis peristiwa dan fenomena yang tinggi kadar campuran ekonomi dan politiknya. Konsep ekonomi politik pertama kali dimunculkan pada abad ke 18 yang ditandai dengan pergeseran istilah dari ekonomi menjadi ekonomi politik. Istilah ekonomi diambil dari sebuah konsep Yunani yang berarti manajemen rumah tangga, sementara ekonomi politik dimaksudkan sebagai manajemen tentang urusan ekonomi dalam sebuah negara. Inti pendekatan ekonomi terhadap politik adalah konsep pilihan rasional dan konsep efisiensi.

Ekonomi politik secara definitif dimaknai sebagai interrelasi diantara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi dan lain sebagainya) sehingga mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik baik yang menyangkut aspek, proses, maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang diintrodusir oleh pemerintah. Harus dipahami bahwa bidang politik subordinat terhadap ekonomi artinya instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga, dan investasi dianalisis dengan mempergunakan *setting* sistem politik dimana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi atau dengan kata lain melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan (*a way*

of acting) sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut (*a place to act*).¹⁰

B. Teori Ekonomi Politik Marxian

Salah satu teori yang berkaitan dengan sosialisme adalah Ekonomi Politik Marxian merupakan kritik terhadap sistem ekonomi pasar (kapitalisme). Sosialisme sebagai ideologi secara tradisional dibentuk oleh oposisinya kapitalisme atau bentuk perlawanan dari kapitalisme dan upayanya untuk menyediakan alternatif yang lebih manusiawi dan secara sosial bernilai. Pilar kelembagaan kapitalisme tersebut dianggap oleh Karl Marx sangat eksploitatif karena menempatkan tenaga kerja subordinat berhadapan dengan pemilik modal. Sosialisme adalah tentang umat manusia sebagai makhluk sosial yang disatukan oleh kemanusiaan mereka yang umum. Ideologi sosialisme menanamkan identitas individu yang dibentuk oleh interaksi sosial dan keanggotaan kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga kolektif. Dengan demikian kaum sosialis lebih memilih kerjasama daripada persaingan. Kaum sosialis percaya bahwa kesetaraan sosial adalah penjamin esensial stabilitas dan kohesi sosial dan dari sini memajukan kebebasan yaitu memenuhi kebutuhan material dan menyediakan basis bagi perkembangan pribadi.¹¹

Paham sosialis menentang kepentingan individu sebagai dasar pribadi, juga kebebasan ekonomi yang perlu melibatkan negara yaitu mengusahakan industri negara bukan semata untuk digunakan mencari keuntungan yang melebihi

¹⁰Ahmad Erani Yustika. *Ekonomi Politik Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014). hal.8

¹¹ Andrew Heywood. *Ideologi Politik Sebuah Pengantar*.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2016), hal.166

usaha keuntungan kapitalis yang mungkin berhasil, mungkin tidak. Akan tetapi, untuk mengembangkan sistem penyelenggaraan industri yang lebih demokratis, bermanfaat, dan bermatabat, penggunaan mesin yang lebih memperhatikan manusia dan penggunaan hasil kecerdasan manusia yang lebih bijak.¹² Menurut Schumpeter dalam Winardi (1993:93) sosialisme adalah suatu organisasi masyarakat, dimana alat-alat produksi dikuasai pemerintah dan keputusan-keputusan mengenai bagaimana dan apa yang akan dihasilkan, dan siapa yang akan mencapai apa, dilakukan bukan oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki serta yang dikelola pihak-pihak swasta, melainkan oleh pemerintah.

Sistem ekonomi sosialis meletakkan faktor-faktor produksi (*means of production*) di bawah kontrol negara. Keputusan produksi dan investasi tidak dilakukan melalui pasar dan para kapitalis (sektor privat), tetapi berdasarkan perencanaan terpusat (*central plan*). Perencanaan tersebut isinya meliputi target tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan perangkat yang dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Negara dalam mendesain dan mengimplementasikan rencana mempertimbangkan seluruh kebutuhan warga negara (*the entire society*) berdasarkan sumber daya yang dimiliki berbasiskan tindakan kolektif daripada kepentingan privat. Perencanaan dilihat sebagai perangkat pembangunan yang menguntungkan karena hal itu bisa mengeliminasi ketidakpastian yang inheren dalam sistem pasar.¹³

Ekonomi kelembagaan sistem ekonomi sosialis hanya berdasarkan pada dua prinsip berikut. *Pertama*, negara menyiapkan seluruh regulasi yang

¹² Firdaus Syam. *Pemikiran Politik Barat Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*. (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2010). hal. 268

¹³ Ahmad Erani Yustika. *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014). hal. 39

diperlukan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, seperti, investasi, dari mulai proses, perencanaan, operasionalisasi, pengawasan, sampai ke evaluasi. Negara bukan Cuma mengontrol tetapi juga menguasai hak kepemilikan. Dengan prosedur inilah negara berharap target pemerataan pendapatan bisa dicapai. *Kedua*, pelaku ekonomi tidak membuat kesepakatan dengan pelaku ekonomi lainnya tetapi setiap pelaku ekonomi membuat kontrak dengan negara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.¹⁴

Agenda politik dari EPM ada dua jenis. *Pertama*, melakukan revolusi untuk mengambil alih kekuasaan negara. Model ini akan terjadi bila masyarakat telah terpolarisasi, konsentrasi modal kian kasat mata, pengangguran semakin membengkak, dan upah kian turun. Dalam situasi ini, kaum buruh diharapkan dapat mengambil alih negara dan sumber daya ekonomi (modal) sehingga yang menjadi penentu kegiatan ekonomi (produksi) bukan lagi pemilik modal. Bagi Marx, Negara mencerminkan asimetri-tentang negara asimetri hubungan jelas dalam, sebuah masyarakat borjuis, yang perlu diakhiri dengan kemunculan kembali sosialisme. *Kedua*, agenda ekonomi politik dikerjakan lewat cara yang lebih lunak, yakni pekerja partisipasi dalam kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, atau mengikuti pemilihan legislatif. Tujuan model ini adalah kelompok buruh dapat mengakses institusi politik sehingga turut dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan.¹⁵

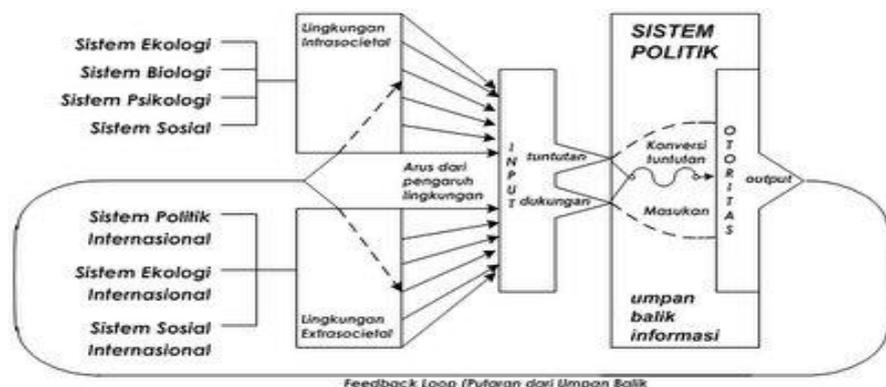
¹⁴ *Ibid*, hal. 42

¹⁵ *Ibid*, hal. 44.

C. Model Kebijakan Sistem Politik David Easton

Menurut James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Selain Anderson, Carl Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu¹⁶. Dalam kebijakan terdapat model yaitu sebuah kerangka sederhana untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena seperti model sistem politik Menurut David Easton sebagai berikut modelnya:¹⁷

Gambar 1.1 Model Kebijakan Sistem Politik David Easton



David Easton melihat kebijakan sebagai suatu sistem yang terdiri dari *input*, *conversion*, dan *output*. Dalam konteks ini ada dua variabel mikro yang mempengaruhi yaitu lingkungan domestik/intrasocietal dan lingkungan internasional/ extrasocietal, keduanya dapat memberikan atau proses awalnya bermula dari *input* yang berupa dukungan atau tuntutan terhadap sebuah sistem

¹⁶ Dwiyanto Indiahono. *Kebijakan Publik Berbasisi Dynamic Policy Analisis*. (Yogyakarta:Gava Media, 2009). hal. 18

¹⁷ *Ibid*, hal. 26.

politik, kemudian para aktor dalam sistem politik akan memproses atau mengkonversi *input* tersebut menjadi *output* yang berwujud peraturan dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan tersebut akan diterima oleh masyarakat, selanjutnya masyarakat akan memberikan umpan balik/*feedback* dalam bentuk *input* baru kepada sistem politik, apabila kebijakan tersebut memberikan insentif maka masyarakat akan mendukungnya dan sebaliknya apabila kebijakan tersebut bersifat disinsentif maka masyarakat akan melakukan tuntutan baru.

Penulis menggunakan Teori Ekonomi Politik Marxian dan Model Kebijakan Sistem Politik David Easton sebagai pisau untuk membedah bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi politik yang dikeluarkannya sebagai bentuk dari adanya pemikiran sosialisme abad 21 dalam memimpin di Venezuela dimana akhirnya dari kebijakan-kebijakan tersebut mampu menyejahterakan rakyatnya dan mengeluarkan negara Venezuela dari krisis yang terjadi saat itu. Maka dalam hal ini peran Hugo Chavez sebagai presiden mampu mengatasi kegagalan negaranya dan mampu menciptakan kestabilan untuk negara Venezuela setelah Hugo Chavez menjabat kekuasaan minyak tidak disalahgunakan oleh kalangan elit saja dan dampaknya bukan hanya dirasakan oleh rakyat Venezuela saja tetapi negara-negara di Amerika Latin merasakan dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh Chavez, bahkan Chavez mengubah pandangan dunia mengenai sosialisme yang dianggap sudah mati dan menjadi *prime mover* (penggerak utama) munculnya sosialisme abad 21. Sehingga menemukan hubungan antaran pemikiran sosialisme abad 21 dengan kebijakan ekonomi politik seperti kebijakan menasionalisasi perusahaan minyak, harga minyak murah, kebijakan luar negeri

soft power, dan kebijakan yang terangkum dalam *mission* yang dikeluarkan oleh Hugo Chavez.

D. Politik Populisme

Populisme lahir dari kebijakan yang tidak jelas, bahwa kebijakan semacam ini selalu membawa *embel-embel* “untuk masyarakat” tanpa pemikiran yang matang tentang bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut. Akhirnya muncul kekecewaan, ketakutan dan kebencian terhadap janji-janji politik dan kebijakan irasional yang dibawa seorang politisi. Kebijakan semacam ini keluar tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang dan hanya untuk keuntungan jangka pendek (pemilu).

Logika populisme adalah imajinasi moral dari politik, tentang cara pandang kita melihat dunia politik yang seharusnya murni secara moral dan bersatu, yang sebenarnya hanya fiksi belaka. Populisme adalah masyarakat melawan elit yang dianggap korup atau lemah secara moral. Populis tidak hanya anti-elitis, tapi juga anti-prulalis, karena mereka mengklaim bahwa hanya mereka yang merepresentasikan masyarakat. Kelompok lain yang tidak bersama mereka akan dianggap immoral, korup, meskipun saat berkuasa pada akhirnya mereka juga tidak mengakui kelompok oposisinya.¹⁸

Menurut Laclau memahami populisme sebagai gerakan politik multi-kelas dan supra-kelas yang hadir dalam momen politik rapuhnya hegemonik kekuatan politik dominan sehingga memberi peluang munculnya struktur kesempatan

¹⁸ Reza Hakim, “Memahami Populisme secara Singkat dan Cepat”, Geotimes, 10 Januari 2019. <https://geotimes.co.id/opini/memahami-populisme-secara-singkat-dan-cepat/> (akses 11 September 2019)

politik baru bagi gerakan politik akar rumput yang dipimpin oleh pemimpin kharismatik untuk mengartikulasikan wacana radikal anti-kemapanan. Populisme sendiri bukanlah ideologi politik dengan tatanan nilai yang solid dan spesifik, namun populisme adalah sebuah teknik politik yang dapat muncul dalam berbagai fenomena politik yang berbeda. Yang mempersatukan populisme dalam segenap ragam ekspresi dan ideologi politiknya sebagai sebuah teknik adalah mereka semua menggunakan model mobilisasi politik yang massif, menggunakan tradisi populis yang tertanam di akar rumput dan digerakkan oleh kepemimpinan figur kharismatik yang memiliki kemampuan komunikasi politik yang handal, dan gerakan tersebut seringkali hadir ketika kekuatan hegemoni kelas dominan sedang runtuh.¹⁹

Penulis menggunakan politik populisme untuk mendukung teori sebelumnya agar analisis bisa dilakukan lebih mendalam dan secara detail untuk mengetahui bagaimana kebijakan ekonomi politik buah dari pemikiran seorang Hugo Cahvez yang membuat Chavez begitu amat dicintai oleh rakyatnya dan mampu menentang Amerika Serikat dengan neoliberalnya juga Cahvez menjadi *prime mover* negara-negara lain di Amerika Latin agar tidak bergantung lagi dengan Amerika Serikat atau mandiri sehingga tidak diperbudak oleh kapitalisme maka dengan menggunakan politik populisme hal tersebut bisa dianalisis lebih mendalam.

¹⁹ Melfin Zaenuri, "Mempertahankan Populisme Kiri", Lingkar Studi Filsafat, 06 Februari 2019. <http://lsfcogito.org/mempertahankan-populisme-kiri/> (akses 11 September 2019)

E. Kerangka Pemikiran

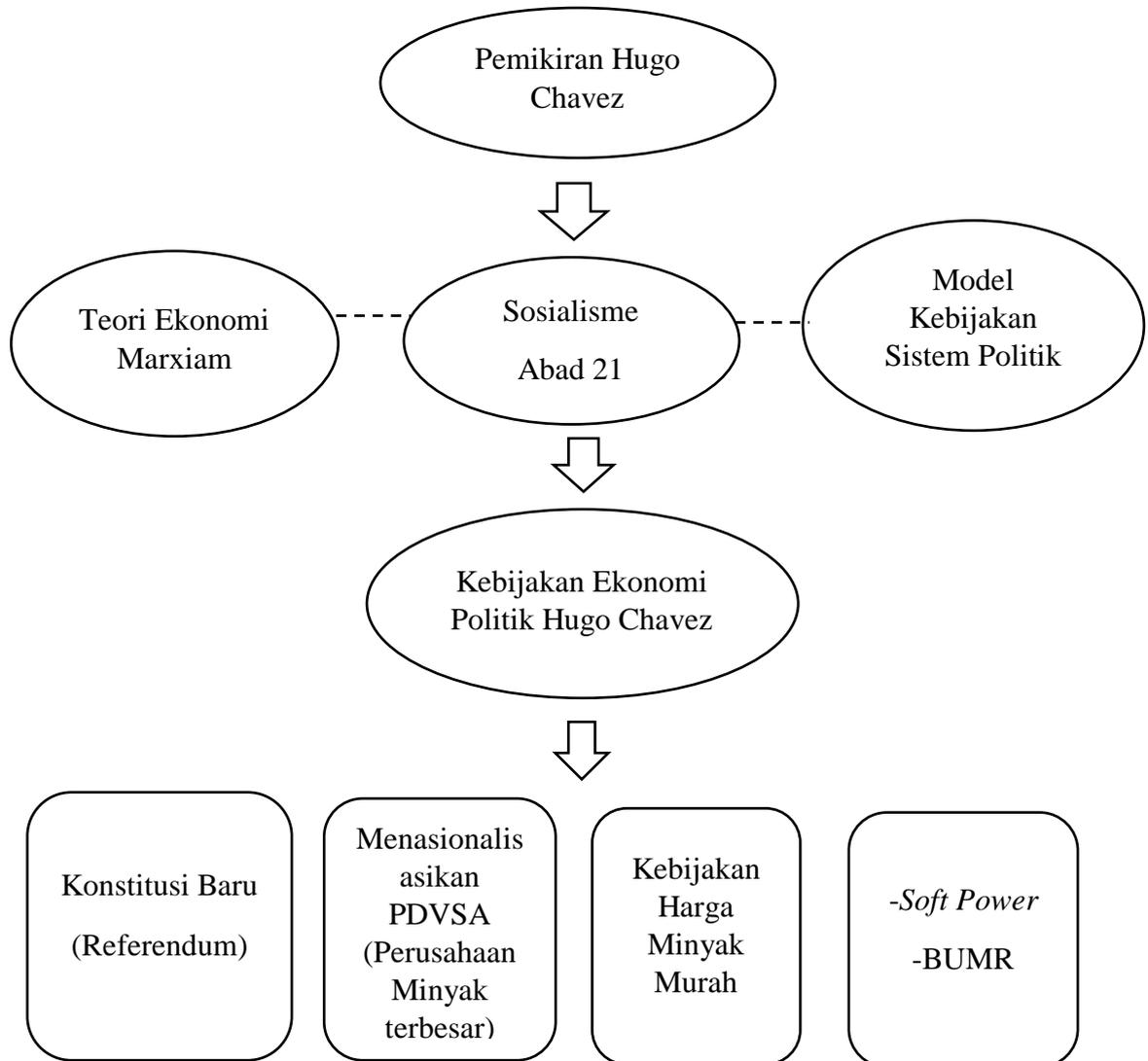
Berawal dari krisis ekonomi dan kekacauan yang terjadi di negara Venezuela yang diakibatkan oleh kegagalan kebijakan neoliberal yang diterapkan di Venezuela yaitu dengan memanfaatkan kekayaan alam minyak. Dimana Venezuela terkenal dengan minyaknya, minyak membawa pengaruh yang baik juga tidak baik bagi Venezuela. Pada tahun 1978 harganya anjlok selain itu pengeluaran negara yang ceroboh tidak terkontrol, *capital flight*, inkompetensi tercipta dan korupsi pun dengan cepat menempatkan negara itu menjadi negara penghutang. Yang menikmati hasil dari minyak hanya elit atau segelintir orang saja dan rakyat tidak merasakan hasil dari kekayaan buminya itu. Puncaknya pada tahun 1989 masa mengamuk kejalanan yang menyebabkan kekacauan.

Karena itulah Hugo Chavez adalah sosok yang sadar akan ada kesalahan dalam negaranya, pada tahun 1992 melakukan kudeta tetapi gagal kemudian ia tidak menyerah dengan terpilihnya menjadi Presiden Venezuela yang membawa angin segar untuk melakukan perubahan dan perlawanan. Ide-ide gerakan melawan neoliberal di Amerika Latin membentang dari Kuba oleh Fidel Castro (1959) sekaligus guru yang oleh Hugo Chavez, Salvador Allende dari Chile (1970), kemudian dengan terpilihnya Hugo Chavez pada pemilihan tahun 1998 di Venezuela merupakan bangkitnya kekuatan Kiri di Amerika Latin sebagai tanda perlawanan terhadap neoliberal. Ada yang membuat Hugo Chavez berbeda dari perlawanan presiden Amerika Latin lainnya yaitu Chavez sebagai *prime mover* (penggerak utama) adanya Sosialisme Abad 21 yang termanifestasikan melalui kebijakan ekonomi politik yang dikeluarkannya sehingga mampu membawa

negara Venezuela keluar dari krisis yang dialaminya dan menjadi sosok yang sangat di cintai oleh rakyat.

Oleh karena itu penulis akan mengkaji Kebijakan Ekonomi Politik Hugo Chavez ini menggunakan Teori Ekonomi Politik Marxian, Model Kebijakan Sistem Politik, dan Politik Populisme yang digunakan sebagai pisau analisis sehingga akan menjawab dan menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi politik Hugo Chavez yang membawa Venezuela keluar dari krisis yang dialami, juga dirasakan oleh Negara Amerika Latin lainnya bahkan dunia dan mengkritisi dari adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Chavez karena setelah Chavez meninggal dan kepemimpinannya diteruskan oleh wakilnya yaitu Maduro justru keadaan negara Venezuela semakin memburuk daripada sebelumnya sebelum Chavez menjabat sebagai presiden.

BAGAN 1.1 Kerangka Pemikiran



F. Penelitian terdahulu

Untuk menambah ketajaman penelitian ini, penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai referensi dalam upaya mencapai tujuan penelitian yang baik. Penulis mendapatkan tulisan-tulisan dan hasil penelitian yang secara khusus mengkaji Hugo Chavez baik dalam kepemimpinannya dan kebijakan-kebijakannya. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi diantaranya adalah

penelitian yang dilakukan oleh Afeb Andrianto berjudul Kebijakan-kebijakan Pemerintah Hugo Chavez di Venezuela (1999-2011) tahun 2012 dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta dan Benardy Ferdiansyah berjudul Kebijakan Hugo Chavez di Venezuela Dalam Melawan Amerika Serikat (2002-2005), tahun 2011, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah. Selain skripsi penulis juga menemukan tesis yang ditulis oleh Muhammad Ashry Sallatu berjudul Landasan Pemikiran di Balik Bolivarian Alternatives for the Americas (ALBA), tahun 2008 dari Jurusan Hubungan Internasional, Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Afeb Andrianto berjudul Kebijakan-kebijakan Pemerintah Hugo Chavez di Venezuela (1999-2011) tahun 2012 dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta	menggambarkan kebijakan-kebijakan Hugo Chavez dimulai dari kebijakan ekonomi, pendidikan, sosial sampai hubungan internasional kemudian dampak-dampak dari kebijakan tersebut	Sama-sama menjelaskan mengenai kebijakan hugo Chavez	penulis tidak hanya menggambarkan mengenai kebijakan-kebijakan Hugo Chavez tetapi penulis juga menganalisis menggunakan teori ekonomi politik marxian dan dengan model kebijakan sistem politik David Easton juga Politik Populisme sehingga akan menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana seorang Presiden Hugo Chavez menjadi

				<p><i>prime mover</i> sosialisme abad 21 dengan kebijakan ekonomi politik yang dikeluarkannya mampu membawa Venezuela keluar dari krisis dan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Venezuela saja tetapi negara-negara lain juga bahkan dunia.</p>
2	<p>Benardy Ferdiansyah berjudul Kebijakan Hugo Chavez di Venezuela Dalam Melawan Amerika Serikat (2002-2005), tahun 2011, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah</p>	<p>Menggambarkan kebijakan-kebijakan yang diambil Hugo Chavez untuk melawan hegemoni Amerika Serikat di Venezuela yang mengakibatkan negara Venezuela mengalami krisis ekonomi dan kemiskinan yang meningkat.</p>	<p>Sama-sama menjelaskan mengenai kebijakan hugo Chavez</p>	<p>Perbedaan dengan penulis yaitu penulis membahas kebijakan-kebijakan ekonomi politik sekaligus didalamnya membahas kebijakan Hugo Chavez dalam melawan Amerika Serikat karena termasuk ke dalam kebijakan Politiknya.</p>
3	<p>Muhammad Ashry Sallatu berjudul Landasan Pemikiran di Balik Bolivarian Alternatives for the Americas (ALBA), tahun 2008 dari Jurusan Hubungan Internasional, Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia</p>	<p>ide Hugo Chavez mengenai kerjasama regional negara-negara Amerika Ltin dalam melawan hegemoni neoliberal Amerika Serikat.</p>	<p>Membahas salah satu kebijakan Hugo Chavez</p>	<p>Perbedaan dengan penulis yaitu dalam pembahasannya penulis berfokus pemikiran politik sosialisme abad 21 yang termanifestasikan melalui kebijakan ekonomi politik yang dikeluarkan oleh Hugo Chavez yang berlandaskan cita-cita dan prinsip Bolivarian.</p>

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam usulan penelitian yang sesuai dengan metode ilmiah ada 5 langkah dan melengkapi elemen-elemen pendekatan sistematika pada penelitian yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, bab ini terdiri dari Konsep Sosialisme, Teori Ekonomi Politik Maxian, Model Kebijakan Sistem Politik David Easto, Politik Populisme, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

Bab III Metode Penelitian, bab ini terdiri dari Metode penelitian kualitatif, Jenis penelitian kualitatif studi tokoh yang menggunakan pendekatan studi pustaka, dimana data yang diambil dari sumber buku yang berkaitan tentang Hugo Chavez, jurnal-jurnal dan juga internet.

Bab IV Pembahasan, bab ini terdiri dari penjelasan mengenai negara Venezuela, Riwayat Hidup Hugo Chavez menjelaskan masa kecil, karir sebagai militer sampai menjadi presiden Venezuela, Kebijakan Ekonomi Politik buah dari Pemikiran Hugo Chavez yang disebut Revolusi Boliarian atau juga sebagai bentuk Jalan Sosialisme Abad 21, dampak dari Kebijakan Ekonomi Politik Hugo Chavez di Venezuela dan di dunia khususnya dinegara Amerika Latin dan Kritik terhadap kebijakan ekonomi politik Hugo Chavez ketika masa pemerintahannya membawa Venezuela keluar dari krisis dan sepeninggal Hugo Chavez negara Venezuela mengalami krisis kembali dan relevansi kebijakan Hugo Chavez dengan Kondisi di Indonesia.

Bab V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran Kebijakan Ekonomi Politik Hugo Chavez.